



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128  
TELEPON : 0251-8359462 FAKSIMILE : 0251-8380588 / 8328382  
Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : [bsip.nakeswan@pertanian.go.id](mailto:bsip.nakeswan@pertanian.go.id)

**BERITA ACARA**

**PELAKSANAAN *PUBLIC HEARING* STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
(PSIPKH),  
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR (LPSI-RB),  
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL (LPSI-RK)**

Nomor : 922/OT.080/H.S/11/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang dilaksanakan secara hybrid dari Ruang Rapat Caliandra (Ruang Aula) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH), Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, dimulai pada pukul 08.00 WIB, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah mengadakan *public hearing* standar pelayanan publik yang membahas penyusunan standar pelayanan publik pada kantor Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH), Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar (LPSI-RB), Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil (LPSI-RK) yang dihadiri oleh *Stakeholder* yang terdiri dari perwakilan Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Akademisi, Masyarakat Pengguna Layanan Lingkup PSIPKH beserta pemangku kepentingan terkait.

Pertemuan *public hearing* menghasilkan kesepakatan antara lain :

1. Layanan publik harus mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2. Jenis Layanan yang diberikan oleh kantor Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) adalah Layanan Informasi dan Konsultasi, Layanan Perpustakaan, dan Layanan Magang, Bimbingan atau PKL siswa dan Mahasiswas serta Layanan Pengujian Laboratorium.

3. Usulan Maklumat Layanan Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH):  
"Kami Pegawai Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) dengan ini berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku"
4. Standar Pelayanan yang telah dibahas dan disepakati dipublikasikan pada Situs Web dan Media Sosial Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara kesepakatan dan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau masukan;
5. Pengguna jasa atau Pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipublikasikan terhadap Standar Waktu Pelayanan yang ditandatangani pada berita acara;
6. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) beserta Unit Kerja Lingkup PSIPKH, memperbaiki Standar Waktu Pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak batas akhir pengajuan anggapan atau masukan dari pengguna jasa atau pihak terkait.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) beberapa perwakilan undangan dan *Stakeholders* pengguna layanan Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) yang disaksikan oleh perwakilan OMBUNDSMAN Pusat Republik Indonesia dan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

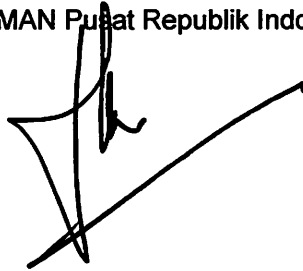
**Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan  
dan Kesehatan Hewan (PSIPKH)**



Dr. Agus Susanto, M.Si

**Disaksikan Oleh :**

OMBUDSMAN Pusat Republik Indonesia



(Andi, S.H., M.M)

Biro Hubungan masyarakat dan Informasi  
Publik Kementerian Pertanian



(Hendrayani)

**Wakil Peserta :**

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kota Bogor



(Saptina Aryani)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Bogor



(Frisela Sibarani)

Fakultas Peternakan IPB University



(Irma Isnafis)

PT. Usaha Adi Sanggoro



(Irma Naya)

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia  
(PDHI) Cabang Jawa Barat II



(R. Soenarti Daroendio W)

Himpunan Peternak Domba Kambing  
Indonesia (HPDKI) Bogor Raya



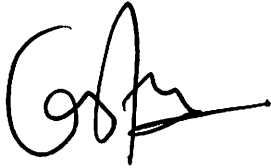
(Diaz Yudha S)

Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas  
dan Aneka Ternak (BPSI-UAT)



(Andi Saenab)

Tabloid Sinar Tani



(Gesha)

Kelompok Wanita Tani (KWT) Azalea



(Endeh Diana)

Pusat Standardisasi Instrumen  
Hortikultura (PSI Hortikultura)



(Ofi Luthfiah)

Majalah Trobos Livestock



(Rahmad Ramdan)

PT. Lumina Agro

(Hanif Zaidan S)

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

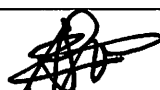

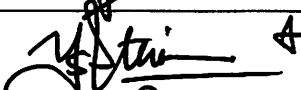

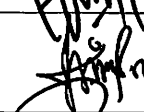
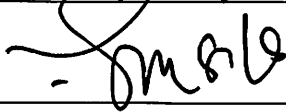

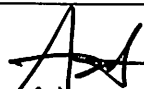
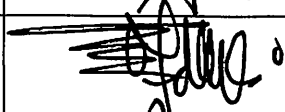
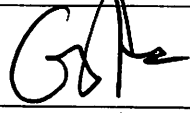


PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN


DAN KESEHATAN HEWAN (PSIPKH),

LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR (LPSI-RB) dan

LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL (LPSI-RK)

Standar Pelayanan Publik ini dimutakhirkan oleh :

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. drh. Agus Susanto, M.Si – Kepala PSIPKH	
2. Andi, S.H, M.M – Ombudsman Republik Indonesia	
3. drh. Saptina Aryani	
4. M. HENDIYANI	
5. IRMA. NAYFI	
6. SOENARTI D	
7. DIAZ YUDHA SAPTA	
8. Andi Srenal	
9. Ofi Lestipizah	
10. Gesha	
11. Rama.	
12. Endeh Diana	

	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN		
	<b>PROSEDUR MUTU</b>		
	KOMUNIKASI INTERNAL		
No. Dokumen PM-PUSLITBANGNAK-5.5.3/F4	Tanggal Berlaku 12 Maret 2014	Revisi 1	Halaman 1 dari 3

### NOTULEN RAPAT

1. Hari/Tanggal : Jum'at, 24 November 2023
2. Agenda : *Public Hearing* PSIPKH
3. Peserta


No.	Nama	No.	Nama
1.	Dr. drh. Agus Susanto, M.Si - PSIPKH	26.	Asep Supriadi – PSIPKH
2.	Ir. Narta, M.Si - PSIPKH	27.	Ofi Luthfiah – BSIP Horti
3.	Soenarti – PDHI Jabar 2	28.	Primma Santanu – BSIP Horti
4.	Endeh Diana – KWT Azalea	29.	Febri Mundani – PSIPKH
5.	Andi Saenab – BPSI UAT	30.	Parto -PSIPKH
6.	Nandi Hendriana - PSIPKH	31.	Ruliansyah - PSIPKH
7.	Nur Chasanah - PSIPKH	32.	Sudrajat -PSIPKH
8.	Zuratih -PSIPKH	33.	Yunus, S- PSIPKH
9.	Imas Sri N -PSIPKH	34.	Qonita M.N. -PSIPKH
10.	Dinda Akhlaqulhusna - PSIPKH	35.	Pringgo Pandu - PSIPKH
11.	Iif Syarifah M -PSIPKH	36.	Nur Rohani – PSIPKH
12.	Hasanatun Hasinah - PSIPKH	37.	Gesha – Sinar Tani
13.	Sarah Afifah - PSIPKH	38.	Saptina Anjani – DKPP Kota Bogor
14.	Kiki Marlia - PT. Usaha Adi Sanggoro	39.	Yudha – HPDKI Bogor Raya
15.	Irna Nayfi - PT. Usaha Adi Sanggoro	40.	Nandan – Trobos
16.	Dadang S. – BPSI UAT	41.	Alif Rizky – PSIPKH
17.	Juniawati – BSIP Pascapanen	42.	Janfrey – PSIPKH
18.	Rio Adhitya C. – PSIPKH	43.	Siti Kuraesin – BBPSI Veteriner
19.	Frisela Sibarani – Diskominfo	44.	Bela – BBPSI Penerapan
20.	Tati Herawati - Makindo	45.	Mety – BSIP SDLP
21.	Windhy Octaviani – Diskominfo	46.	Irma Isnafia – Fapet IPB
22.	Imam – PSIPKH	47.	Cahyatina Tri Rahayu - PSIPKH
23.	Eko Kardiyanto – PSIPKH	48.	Joko Muhadi - PSIPKH
24.	Hendra – Biro Humas	49.	Irfan - Asnet
25.	Yosephine Erlinda – PSIPKH	50.	M. Indra Fauzy - PSIPKH
		51.	Andi – Ombudsman RI

4. Hasil Rapat: (terlampir)

Bogor, 24 November 2023

Notulis,

Dinda Akhlaqulhusna, S.Pt

	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN			
	<b>PROSEDUR MUTU</b>			
	KOMUNIKASI INTERNAL			
No. Dokumen PM-PUSLITBANGNAK-5.5.3/F4	Tanggal Berlaku 12 Maret 2014	Revisi 1	Halaman 2 dari 3	

1. *Public Hearing* di Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan pada hari Jum'at, 24 November 2023 yang diikuti secara *hybrid* sesuai dengan surat undangan *public hearing* SPP Nomor B-902/HM.130/H.5/11/2023 tanggal 17 November 2023.

**2. Hasil kegiatan rapat *Public Hearing* PSIPKH antara lain:**

1. Sesuai surat undangan *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik (SPP) PSIPKH, Rapat dilakukan secara *hybrid* menggunakan *zoom meeting* dan luring yang dihadiri oleh perwakilan seluruh satker Lingkup BSIP Kementan, Kementerian/Lembaga, pemerintah lokal/setempat, institusi pendidikan, *stakeholder* dan masyarakat umum lainnya;

2. Moderator *public hearing* sesi pertama dan kedua dimoderatori oleh Kepala Bagian Tata Usaha (Ir. Narta, M.Si);

Rapat dibuka oleh Sambutan dari Kepala PSIPKH (Dr. drh. Agus Susanto, M.Si) yang dalam arahannya menyampaikan bahwa Standar Pelayanan Publik pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, wajib dilaksanakan dengan baik, bertanggung jawab, dan berkeadilan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan publik.

3. Paparan Pertama disampaikan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Drs. Zulkifli, MM) Pelayanan public yg baik adalah gambaran kehadiran sebuah negara berdasarkan pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo.


Kredibilitas sebuah negara bisa diukur dari tindak lanjut dari standar pelayanan publik

Jika ingin melakukan survey kepuasan masyarakat, ada hal yang harus kita pastikan dari harapan masyarakat dalam pelayanan publik.

Ekspektasi yang ingin dilayani meningkat terus. Oleh karena itu harus ada peningkatan dari pelayanan sebelumnya.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang sudah dilakukan oleh Kementan antara lain :

- a. Penguatan Kebijakan Pelayanan Publik
- b. Survey Kepuasan Masyarakat
- c. Peningkatan Profesionalisme SDM
- d. Pengelolaan SIPPN
- e. Pengelolaan SP4N Laporan!
- f. Transformasi digital, pembinaan dan pelembagaan inovasi pelayanan public
- g. Peningkatan kualitas dan penerapan jaminan mutu layanan melalui akreditasi dan manajemen mutu
- h. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan percepatan usaha bidang pertanian
- i. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai dan inklusif

	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN			
	<b>PROSEDUR MUTU</b>			
	KOMUNIKASI INTERNAL			
No. Dokumen PM-PUSLITBANGNAK-5.5.3/F4	Tanggal Beraku 12 Maret 2014	Revisi 1	Halaman 3 dari 3	

Perlunya mempertahankan predikat kepatuhan tertinggi SPP.

Apapun yang kita lakukan harus menggunakan visi pelayanan publik.

Visi Pelayanan Publik harus mencakup Percepatan pelayanan publik, efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas pelayanan.

- Paparan Kedua disampaikan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Andi, SH., MM.) yang dalam paparannya berjudul Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik PSIPKH Standar Pelayanan Publik Menuju Layanan Prima di Instansi Pemerintah;

SPP adalah salah satu mitigasi untuk mencegah penyimpangan, pungli, dan pelayanan yang tidak jelas.

SPP adalah kewajiban instansi untuk mensosialisasikan dan mengedukasi publik.

*Public Hearing* hak masyarakat dan kewajiban bagi instansi untuk mensosialisasi dan desiminasi.

UU No. 25 Tahun 2019 sebagai UU penyambung dari semua Undang-undang. Bagaimana pelayanan harus dilakukan.

Ombudsman itu jembatan rakyat.

Pelayanan public ada 3 (tiga) jenis :

- *Good public*
- *Service public*
- *Administrative public*

Tujuan *Public Hearing* :

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk memberikan usulan, masukan dan saran serta memperoleh pemahaman hingga solusi.

Prinsip *Public Hearing* :

Sederhana, partisipatif, transparansi, keadilan, akuntabel, berkelanjutan

Yang dapat melihat secara objektif itu masyarakat. SPP itu penting karena merupakan indicator. Jadi dapat dipampang standar layanan agar masyarakat dapat memahami.

- Paparan berikutnya disampaikan oleh Ketua Tim Kerja SPHP (Hasanaton Hasinah), Koordinator Layanan Humas (Mutia Primananda, S.Pt., M.P) dan Kepala LPSI Ruminansia Kecil (Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P) dalam paparannya menyampaikan SPP di unit kerja masing-masing.


- Pertanyaan dan Saran

#### **Bu Atien Priyanti BRIN**

Kita tak semata-mata hanya di layanan, maka perlu ada input, proses dan output

Saran : Untuk melaksanakan proses standardisasi lebih ke arah mutu.



	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN			
	<b>PROSEDUR MUTU</b>			
	KOMUNIKASI INTERNAL			
No. Dokumen PM-PUSLITBANGNAK-5.5.3/F4	Tanggal Berlaku 12 Maret 2014	Revisi 1	Halaman 4 dari 3	

Bukan hanya input, proses dan output tapi peningkatan mutu di masing-masing pilar.

Catatan Ombudsman :

Biaya sesuai kesepakatan. Jadi harus didetailkan dan ditetapkan  
Ombudsman bisa bantu di Baku mutu dan waktunya

**Bu Bess Tiesnamurti BRIN**

Saran untuk PSIPKH :

- Terkait koordinasi perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi. Mohon dijelaskan tentang koordinasi penerapan.

Pertanyaan untuk LPSI RB :

1. Untuk analisis laboratorium mengambil waktu 14 hari, apakah berlaku untuk semua jenis analisis terutama untuk analisis kualitas sperma. Mohon info berapa lama dari koleksi sperma dapat dilakukan analisis?

Untuk layanan molekuler, apakah ada juga untuk sequencing hasil amplifikasi DNA?

**Jawab :**

Layanan analisis 14 hari berlaku untuk semua jenis layanan analisis dalam kondisi normal. Analisis kualitas spermatozoa dengan lingkup pengujian motilitas, konsentrasi, pH, dan viabilitas.

Layanan *sequencing DNA* belum bisa dilakukan. Lingkup pengujian di layanan genetika molekuler yaitu isolasi, PCR, RFLP, dan elektroforesis.

Janji pelayanan analisis dengan parameter pengujian proksimat pakan/bahan pakan, yaitu, 14 hari kerja (batas maksimal), untuk analisis kualitas spermatozoa dengan lingkup pengujian motilitas, konsentrasi, pH. dan viabilitas.

Sedangkan untuk *sequencing* laboratorium belum bisa dilakukan. Lingkup pengujian di layanan genetika molekuler yaitu isolasi, PCR, RFLP, dan elektroforesis.

Pertanyaan untuk LPSI RK :

2. berapa biaya untuk analisis lab yang dimaksud;

**Jawab :** Sesuai PP tarif, untuk biaya analisa di lab pakan ternak yaitu KA (Kadar Air) : Rp.20.000, KA (Kadar Abu) : Rp.25.000, PK (Protein Kasar) : Rp.75.000, SK (Serat Kasar) : Rp.50.000, LK (Lemak Kasar) : Rp.60.000, ADF : Rp. 60.000, NDF : Rp.60.000


3. berapa bibit dihasilkan per tahun dan dapat di mitrakan?

**Jawab :** Sesuai IKU bibit yang dapat dimitrakan sebanyak : 100 ekor boerka, 100 ekor domba dan 100 tanaman pakan ternak

**Pak Ir. Didiak Purwanto – ISPI (Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia)**

Seringkali terjadi benturan kecepatan. Kebutuhan standard dari pengguna dengan instansi Kebutuhan standar lebih cepat dripd proses pengajuan standarnya.

Bagaimana standar harus di improve terus. Memacu utk pengguna/produsen di lapangan agar meningkatkan kualitas produksinya. Agar dapat bersaing dengan produk di luar negeri.

	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN		
	<b>PROSEDUR MUTU</b>		
	KOMUNIKASI INTERNAL		
No. Dokumen PM-PUSLITBANGNAK-5.5.3/F4	Tanggal Berlaku 12 Maret 2014	Revisi 1	Halaman 5 dari 3

**Bu Nuning – BISIP**

Apakah masih dimungkinkan pelayanan untuk permintaan ternak hidup ya? saya bertanya pribadi aja, karena isu ini sering kali ada ya dari masyarakat atau kelompok peternak?

**Pak Rian Arisandy - Diskanak Batu Bara**

Saran : Izin saran agar bisa dijajaki kerjasama BSIP dengan Dinas teknis di daerah dalam rangka pengembangan peternakan ruminansia besar/kecil melalui kelompok ternak terpilih yang memiliki komitmen melalui MoU atau "kemitraan" yang dimonitor secara kontinyu sehingga dapat dijadikan percontohan peternakan terpadu di masing-masing daerah.

**Pak Ismeth Inounu – BRIN**

Sebagai suatu pusat standardisasi maka sebaiknya harus selalu mengupdate diri. Karena bila kadaluarsa standarisasinya akan tidak standar lagi. Contoh pelayanan perpustakaan karena ini di pusat standarisasi maka harus ada info2 baru dan juga dapat diakses secara digital.

**Pak Dicky Mohammad Dikman LPSI RB :**

Layanan akan kami perbaiki sesuai saran.

Untuk membuat suatu standar tidak mudah. Tapi kami mencoba mengikuti saran dan arahan dari PSIPKH.

Kami sudah mengusulkan Sapi Pogasi

Kami berharap, apa yang sudah kami lakukan dapat memenuhi keinginan masyarakat luas.

Kami berusaha merespon dengan cepat keluhan yg disampaikan ke kami.

Catatan Kepala PSIPKH :

- Harmonisasi dan sinergitas dengan UPT lingkup PSIPKH
- Banyak berkomunikasi dengan dirjen teknis
- Adakan zoom untuk diskusi tentang kolaborasi

Bogor, 24 November 2023  
Notulis,

Dinda Akhlaqlhusna, S.Pt



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

**PROSEDUR MUTU**

KOMUNIKASI INTERNAL

No. Dokumen  
PM-PUSLITBANGNAK-5.5.3/F4

Tanggal Berlaku  
12 Maret 2014

Revisi  
1

Halaman  
6 dari 3

**Dokumentasi Kegiatan *Public Hearing* PSIPKH**



Data Publik Hearing offline dan online

1. Link download rekaman zoom : [https://drive.google.com/file/d/1oGNbTOV-rZ3oZDG6\\_3CQn7EI\\_q2TzQq\\_/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1oGNbTOV-rZ3oZDG6_3CQn7EI_q2TzQq_/view?usp=drive_link)
2. Link download audio selama kegiatan :  
[https://drive.google.com/file/d/15FNiKghPGVv5J1DFsh6FDsMfywMJmEqD/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/15FNiKghPGVv5J1DFsh6FDsMfywMJmEqD/view?usp=drive_link)